

Ahmad Rifai

ISBN 979-95174-6-X

PROSIDING

SEMINAR PROPTI FISIP UNILA 2002

TEMA:

PANDANGAN DISIPLIN KEILMUAN DI FISIP UNILA
TERHADAP PERSOALAN BANGSA

Editor:

Agus Hadiawan

Yana Ekana P.S.

I Gede Sidemen

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2003

PROSPEK DAN KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI NIAGA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

Oleh

Ahmad Rifa'i

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Niaga FISIP Universitas Lampung

ABSTRAK

Konsekwensi ditandatanganinya GATT oleh Pemerintah RI adalah penghapusan berbagai hambatan baik tariff maupun non tariff yang masih menjadi masalah bagi berlakunya perdagangan bebas di negara-negara berkembang disamping adanya ketidaksiapan pelaku usaha itu sendiri karena keterbatasan modal, SDM dan managerial yang dimiliki pelaku ekonomi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul seiring diterapkan perdagangan bebas, ilmu administrasi niaga menawarkan solusi yaitu dengan memperkuat basis ekonomi menengah melalui penciptaan entrepreneur, perbaikan managerial terhadap asset swasta/pemerintah serta penciptaan kerjasama/kolaborasi dalam intern lembaga ekonomi maupun antar lembaga dengan memanfaatkan comparative advantage maupun competitive advantage yang dimiliki swasta/pemerintah

Latar Belakang dan Isu Strategis

Era perdagangan bebas (*global market*) sudah dimulai sejak ditandatanganinya kesepakatan GATT (*General Agreement Trade and Tarrif*) dan selanjutnya berhasil dibentuknya sebuah wadah perdagangan dunia yang bernama WTO (*World Trade Organization*). Dalam GATT di sepakati bahwa setiap negara yang menandatangani perjanjian tersebut harus melakukan kegiatan baik secara langsung maupun secara gradual (berangsur-angsur) mulai menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan baik yang berupa hambatan tariff maupun non tariff. Penghapusan hambatan perdagangan yang berupa tariff misalnya dengan menghilangkan tariff pajak bea ekport – import barang, cukai, pajak penjualam barang mewah (PPnBM) dan lain-lain sampai dengan 0% (nol persen). Untuk hambatan yang sifatnya non tariff misalnya penghapusan pungutan-pungutan liar, biaya “entertainment”, dan lain-lain yang sering muncul di negara sedang berkembang.

Pemerintah Republik Indonesia setelah ikut serta dalam penandatanganan GATT secara berangsur-angsur mulai memenuhi ketentuan yang diatur didalamnya secara makro diawali dengan pembentukan kesepakatan diantara negara-negara di Asia dengan membentuk AFTA (*Asean Free Trade Area*) dimana untuk wilayah Asia mulai tahun 2003 menyatakan bebas dari hambatan tariff dan non tariff. Selanjutnya diperluas lagi dengan ditanda tangannya NAFTA (*North Asia Free Trade Area*) yang mulai berlaku pada tahun 2010. Secara mikro Pemerintah RI sendiri mulai menyambut datangnya *global market* dengan menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan berikat. Dalam kawasan berikat di atur bahwa seluruh alat distribusi dan jalur distribusi (kapal laut, pesawat) baik darat maupun udara dari seluruh penjuru dunia bebas untuk singgah dikawasan tersebut tanpa biaya. Ini berarti bahwa seluruh produk (barang, jasa) dari luar dapat masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk selama dalam wilayah kawasan berikat tersebut. Selain itu dalam menyongong *global market*. Pemerintah RI juga melaksanakan kerjasama ekonomi baik secara bilateral maupun multilateral misalnya dengan membentuk kawasan ‘segitiga emas’ yang lebih dikenal dengan nama Sijori (Singapura – Johor – Riau), BIM EAGA (Brunai – Indonesia – Malaysia EAGA) dan lain-lain.

Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, Pemerintah RI mengeluarkan PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status ini dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pendidikan tinggi agar lebih mandiri dan dapat memberdayakan asset PTN tanpa campur tangan pemerintah. Ini berarti suatu peluang dan sekaligus tantangan bagi PTN untuk membuktikan diri apakah mereka benar-benar bisa mandiri dengan mengandalkan asset yang dimiliki (peralatan dan SDM terdidik/*skill labour*) dan menghasilkan *outcome* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan untuk menciptakan kesejahteraan internal PTN.

Berangkat dari itu semua, PTN harus mampu menghasilkan output yang dapat diterima oleh masyarakat baik masyarakat dunia usaha maupun masyarakat umum. Output PTN harus mampu “menyelesaikan” masalah masyarakat utamanya dalam rangka menuju perdagangan bebas. Oleh karenanya seluruh disiplin ilmu yang ada di PTN harus di *set-up* agar bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia– utamanya di

bidang ekonomi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kontribusi positif ilmu administrasi niaga bagi perekonomian global? Bagaimanakah peran aktif ilmu administrasi niaga dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian global? Dimanakah posisi ilmu administrasi niaga dalam percaturan perekonomian global? Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh perguruan tinggi sebagai tempat peggodokan ilmu dan sebagai penghasil sarjana-sarjana bisnis serta bentuk partisipasi aktif ilmu administrasi niaga dalam perdagangan bebas.

Posisi Ilmu Administrasi Niaga Diantara Ilmu Administrasi Lain

Sebagai sebuah ilmu, disiplin administrasi niaga merupakan bagian dari ilmu administrasi yang menginduk pada ilmu-ilmu sosial. Disiplin ilmu administrasi niaga sudah memenuhi kriteria sebuah ilmu yaitu sekelompok pengetahuan mengenai sesuatu pokok soal (manajemen—pen) dengan titik pusat perhatian pada permasalahan tertentu (bisnis—pen) sehingga merupakan pelbagai konsep yang ditelaah oleh budi pekerti manusia berdasarkan suatu metode untuk mencapai kebenaran yang bercirikan empiris, sistematis, obyektif, analitis dan dapat diperiksa kebenarannya (Liang Gie, 1982:36) (Prajudi 1985;102). Sutopo (2001:10) membagi ilmu administrasi menjadi tiga bagian yaitu administrasi negara, administrasi niaga dan administrasi pembangunan. Administrasi negara menekankan kajiannya pada bidang pemerintahan negara dimana pelaku dari administrasi negara tersebut adalah lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Administrasi ini lebih dikenal dengan istilah *public administration*.

Administrasi niaga menekankan kajiannya pada bidang bisnis sehingga sifat usahanya bukan hanya pelayanan seperti yang ada pada administrasi negara tetapi lebih bersifat *profit oriented* (orientasi laba). Dalam ilmu administrasi niaga atau yang lebih dikenal dengan administrasi privat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi privat yang bersifat bisnis dan administrasi privat yang bersifat non bisnis. Administrasi privat yang bersifat bisnis adalah ilmu administrasi yang bekerja untuk memperoleh laba (*profit oriented*) contohnya PT, Persero, CV, Firma dan lain-lain sehingga kelompok ini lebih dikenal dengan nama *business administration*. Sedangkan administrasi privat yang bersifat non bisnis adalah ilmu administrasi yang titik tekan (bidang kerjanya) tidak hanya

didasarkan pada orientasi laba tetapi juga pada pelayanan dan pendampingan. Bentuk pelayanan disini berbeda dengan bentuk pelayanan seperti yang diberikan oleh administrasi negara dimana peran pemerintah sangat besar (pengendali). Ia digolongkan privat non bisnis karena kepemilikannya di kuasai oleh swasta/masyarakat. Ia bisa dikatakan sebagai NGO (*Non Government Organization*). Contoh dari administrasi privat non bisnis adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yaitu Walhi, YLBHI, Kontras dan lain-lain.

Disamping administrasi niaga dan administrasi negara juga dikenal administrasi niaga negara. Ia dikategorikan niaga karena bekerja untuk memperoleh laba (meskipun dalam perjalanannya laba bukanlah hal yang utama). Ia dikategorikan negara karena pelakunya atau kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah atau campuran antara pemerintah dengan swasta. Contoh dari administrasi niaga negara ini adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Semen Gresik, PT. Telkom, Bukit Asam, dan lain-lain. BUMN merupakan “mesin pencetak uang” bagi negara karena kenyataan menunjukkan pengelolaan BUMN lebih didasarkan pada *managerial business* sehingga faktor efisiensi dan efektifitas usaha sangat diperhatikan.

Administrasi pembangunan merupakan administrasi yang menurut Sutopo (2001:12) merupakan administrasi negara yang cocok dipergunakan untuk negara-negara berkembang, yang pada umumnya sedang melakukan pembangunan, sehingga administrasi pembangunan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini muncul karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa administrasi negara hanya bisa berjalan dengan baik di negara-negara maju (Eropa) dan tidak bisa berjalan dengan baik di negara lain termasuk di negara sedang berkembang. Seperti hasil temuan dari *Comparative Administration Group (CGA)* di AS bahwa administrasi tidak dapat berjalan di negara-negara lain karena kondisi lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berbeda.

Dengan demikian diantara ilmu administrasi, administrasi niaga menempatkan diri sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah untuk lebih terberdaya dan mandiri dengan tawaran manajemen yang bermotif laba dengan tetap memperhatikan pelayanan yang memuaskan dan terus-menerus (*sustainable*) kepada masyarakat melalui pendayagunaan asset yang dimiliki. Dalam konteks seperti ini muncul sebuah teori yang dinamakan *reinventing government*.

Perbedaan Administrasi Niaga dan Administrasi Negara

Dalam rangka mempermudah untuk mengetahui posisi administrasi niaga diantara ilmu administrasi yang lain, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengkomparasikan ataupun memetakan perbedaan antara administrasi niaga dengan administrasi negara. Table 01 menunjukkan perbedaan antara administrasi niaga dengan administrasi negara.

Tabel 01: Perbedaan Administrasi Niaga Dengan Administrasi Negara

No	Sudut Pandang	Adm. Niaga	Adm. Negara
1	Tujuan	Pelayanan bermotif laba	Pelayanan masyarakat tanpa motif laba
2	Kewenangan dalam pembuatan kebijakan publik	Tidak ada	Ada kewenangan
3	Wilayah yurisdiksi	Hokum privat	Hukum publik
4	Pelaku	Swasta	Negara/Pemerintah

Dalam tabel 01 terlihat bahwa antara administrasi niaga dan negara terdapat kesamaan dalam hal tujuan yaitu untuk melayani (pelayanan). Perbedaannya muncul pada motif dari pelayanan tersebut yaitu administrasi niaga memberikan pelayanan dengan diikuti motif laba dan administrasi negara tanpa diikuti motif laba. Pelayanan tanpa motif laba dalam administrasi negara dapat terjadi karena pelayanan tersebut dilakukan didasarkan pada peraturan dan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pelayanan bermotif laba pada administrasi niaga muncul karena dasar pelayanan tersebut adalah adanya kebutuhan masyarakat/konsumen dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam melayani kebutuhan tersebut. Filosofinya dalah sebelum memberikan pelayanan, administrasi niaga terlebih dahulu melihat kebutuhan masyarakat/konsumen dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat/konsumen harus dilayani karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam hal kewenangan pembuatan kebijakan publik, administrasi niaga tidak memiliki kewenangan tersebut karena administrasi niaga

merupakan pemakai aktif dari kebijakan tersebut. Secara struktural administrasi negara berada dalam posisi pembuat kebijakan publik yaitu berada di tangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk wilayah yurisdiksi (hukum), administrasi niaga berada dalam wilayah hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara. Berdasarkan hukum privat ini, seluruh sengketa yang terjadi dalam administrasi niaga diselesaikan secara hukum perdata dan hukum dagang. Wilayah yurisdiksi administrasi negara berada dalam wilayah hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Seluruh sengketa yang muncul akan diselesaikan secara hukum pidana ataupun peradilan tata usaha negara (PTUN).

Pelaku kegiatan administrasi negara adalah murni dari pemerintahan dan tidak ada keterlibatan dari pihak swasta secara struktural. Walaupun ada keterlibatan dari pihak swasta sifatnya hanyalah sementara dan diikat dengan perjanjian yang mengedepankan profesionalisme. Contohnya adalah munculnya tender-tender terhadap pekerjaan pemerintah yang melibatkan swasta. Sebaliknya pelaku kegiatan dari administrasi niaga adalah pihak swasta yaitu lembaga-lembaga ekonomi (PT, CV, Firma, dll) atau pun perseorangan (komisioner, perantara, dll). Untuk konteks administrasi niaga negara, pelaku kegiatannya adalah pemerintah atau campuran antara pemerintah dengan pihak swasta (masyarakat) yang bisa dimungkinkan karena masing-masing memiliki saham dalam lembaga tersebut.

Mata Kajian Administrasi Niaga

Sudut pandang dalam paradigma administrasi sangat berbeda dengan sudut pandang dalam paradigma ekonomi. Sejak *elementary school* hingga *high school* kita selalu diajarkan bahwa dalam bertindak dengan motif ekonomi kita harus berfikir bagaimana mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Pemikiran ini terus berlanjut sampai dengan tingkat *university* dimana diajarkan bahwa dalam berusaha faktor modal menjadi suatu yang utama.

Berbeda dengan cara pandang dalam paradigma ekonomi, paradigma administrasi menekankan sebuah kerjasama diantara sumberdaya –baik SDM, SDA maupun sumber daya dalam bentuk lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Liang Gie (1982:33) menyatakan bahwa ilmu administrasi adalah sistem pengetahuan, dengan pengetahuan

tersebut manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada sesuatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerjasama untuk tujuan bersama. Filosofinya adalah bagaimana menginteraksikan dan mengintegrasikan asset yang dimiliki dan titik tekan dari administrasi adalah bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan rangkaian kerja organisasional dalam rangka menuju hasil yang optimal. Seluruh asset yang dimiliki digerakkan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing asset. Dengan demikian hasil yang diperoleh bukanlah suatu bentuk maksimalisasi suatu hasil tetapi lebih sebagai optimalisasi peran masing-masing asset dalam mewujudkan tujuan.

Administrasi niaga sebagai sebuah cabang dari ilmu administrasi memiliki kriteria efisiensi, efektifitas dan rasionalitas. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan terbaik antara input (sumber-sumber yang dipergunakan) dengan output (hasil), dalam arti output lebih besar dari input. Perbandingan terbaik memiliki arti bahwa administrasi niaga berusaha untuk memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki secara optimal untuk memperoleh laba dengan berbasis kerjasama antara elemen organisasi, sehingga tidak ada elemen yang harus terkalahkan/dikorbankan dalam rangka memperoleh laba. Ciri efektifitas dalam administrasi berkaitan dengan waktu. Jika suatu kerjasama yang dijalankan membuat pekerjaan menjadi rumit dan *bertele-tele* maka kegiatan tersebut menjadi tidak berguna dan kurang optimal. Dengan administrasi pekerjaan akan semakin ringan dan cepat terselesaikan. Ciri rasionalitas mengandung arti bahwa segala aktifitas yang ada dalam administrasi niaga akan menghasilkan laba yang rasional (tidak dalam tataran angan-angan). Sebagai ilustrasi mungkinkah dengan modal seribu rupiah akan menghasilkan laba seratus ribu rupiah? Seperti tafsir yang ada dalam motif ekonomi yaitu dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan laba laba yang sebesar-besarnya. Tetapi rasionalkah dengan modal seribu rupiah akan menghasilkan laba lima ribu rupiah?

Administrasi niaga mengkaji seluruh kegiatan ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro. Ekonomi makro yang dikaji dalam administrasi niaga meliputi tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka perbaikan ekonomi misalnya munculnya kebijakan moneter oleh otoritas moneter, masalah inflasi, deflasi dan lain-lain. Kajian mikro dalam administrasi niaga akan membahas masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan perusahaan misalnya keuangan perusahaan (manajemen

keuangan, akuntansi), masalah pemasaran (kebijakan harga, produk, promosi dan distribusi), masalah ketenaga kerjaan dan lain-lain serta dari sisi kelembagaan dibahas tentang lembaga-lembaga pelaku bisnis swasta (PT, CV dll) maupun lembaga bisnis pemerintah (BUMN).

Kajian diatas memperlihatkan adanya keterlibatan pemerintah untuk memfasilitasi pihak swasta dalam berusaha (*ber-business*). Pihak swasta berperan dalam ekonomi mikro baik disektor formal maupun informal dalam skala besar ataupun skala kecil (industri rumah tangga). Namun demikian yang menjadi titik tekan dari kajian administrasi niaga adalah sektor swasta bisnis murni (bermotif laba) dan pelibatan pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator dan “pelindung” bagi keberlangsungan usaha.

Kontribusi Administrasi Niaga dalam Mengatasi Permasalahn Global

Pertumbuhn ekonomi Indonesia yang mencapai 7% sampai dengan tahun 1997 digambarkan oleh Mahatir Mohamad dalam bukunya *A New Deal For Asia* ibarat sebuah balon udara, ia bisa menggelembung besar tetapi didalamnya (ditengah) berupa ruang kosong/ruang hampa. Prediksi tersebut terbukti sehingga pada Juli 1997 balon tersebut mulai meletus dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia “kempes” dan pada puncaknya hingga mencapai minus 10%.

Bila kita kaji lebih mendalam, krisis yang melanda Indonesia semakin parah dan berkeperpanjangan dikarenakan lemahnya ekonomi kelas menengah yang ada di Indonesia. Pengusaha besar dan konglomerasi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia tidak memiliki kesiapan ketika Pemerintah RI tidak sanggup lagi memberikan “perlindungan” dan proteksi. Bersamaan dengan itu pula pemerintah tidak dan belum mempersiapkan pelaku-pelaku ekonomi kelas menengah yang menempati segmen terbesar sebagai pelaku ekonomi. Ekonomi kelas menengah yang dimaksud misalnya industri rumah tangga, koperasi, dan sektor informal lainnya. Keadaan inilah yang memperparah dan memperpanjang krisis yang ada di Indonesia.

Disiplin ilmu administrasi niaga memandang perlunya mencetak pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam sebuah sistem perekonomian. Mereka memiliki kemampuan untuk *survival* dalam kondisi krisis karena mereka memang terbiasa dengan kemandirian. Pengalaman

Malaysia menunjukkan bahwa negara tersebut relatif cepat bangkit dari krisis karena memiliki kelas menengah-ekonomi yang tangguh. Pemerintah dengan dibantu perguruan tinggi harus memprakarsai terciptanya wirausahawan (*entrepreneur*) yang memiliki kemandirian ekonomi. *Entrepreneur- entrepreneur* inilah yang nantinya akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena jumlah mereka sangat besar.

Lebih jauh lagi, niatan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian daerah melalui otonomi daerah harus disambut dengan mempersiapkan sumber daya ekonomi daerah. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, pihak pemerintah daerah harus menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal dan mandiri misalnya dengan menghidupkan dan membina industri rumah tangga, usaha sektor informal dan lain-lain. Munculnya *entrepreneur* di daerah akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan seterusnya akan menggerakkan perekonomian daerah. Solusi semacam ini diberikan karena menurut Prajudi (1986:207) bahwa administrasi niaga adalah administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan (*business objective*), dalam pengertian ini maka administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manajer¹.

Dalam konteks pelaku ekonomi yang lebih besar, kita ambil contoh PT. Perkebunan Nasional (PTPN) yang merupakan BUMN yang besar tetapi kurang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kita bisa menghitung besarnya asset yang dimiliki oleh PTPN yang terdiri dari tanah, bangunan, asset bergerak dan SDM yang berpendidikan begitu besar. Jika PTPN itu menjadi sebuah perusahaan maka ia merupakan perusahaan yang paling kaya diantara perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia. Namun demikian mengapa kontribusi PTPN terhadap perekonomian relatif rendah? Dalam hal ini disiplin ilmu administrasi niaga memandang perlunya sebuah sistem pengadministrasian yang baik. Bagaimana asset yang begitu besar –baik asset tetap maupun asset bergerak—dapat disinergikan dengan potensi SDM yang dimiliki sehingga menimbulkan kerjasama (ekonomi) dalam mencapai tujuan. Masalah *managerial* tidak hanya sebatas perencanaan tetapi lebih dari itu bagaimana mendeteksi potensi yang dimiliki dan kemudian memberdayakannya menuju sebuah tujuan dengan disertai proses pengadministrasian yang baik. Solusi ini diberikan karena

¹ tujuan mempelajari kewirausahaan seperti dijelaskan oleh Nasrullah Yusuf adalah untuk menjadi seorang manajer atau wira manajer.

menurut Prajudi (1986:207) administrasi niaga adalah administrasi daripada suatu organisasai niaga secara keseluruhan; bilamana organisasi niaga tersebut merupakan sebuah perusahaan, maka administrasi niaga tersebut dijalankan oleh direksi perusahaan.

Untuk kontek perekonomian dunia, masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah adanya dominasi negara maju, baik dominasi dalam hal SDM, jaringan, modal dan lain-lain, maka disiplin ilmu administrasi niaga tetap berpegang teguh pada sebuah pandangan bahwa untuk menuju global market diperlukan sebuah kerja sama yang saling bergantung. Kerjasama ini tidak terbatas pada kerjasama antar lembaga tetapi lebih dari itu adanya kerjasama antar individu tersebut dalam lembaga. Tawaran kerja sama ini diberikan bahwa untuk menuju globalisasi perdagangan masing-masing pelaku ekonomi harus mengintegrasikan diri dengan perekonomian yang ada di sekitarnya sehingga antar pelaku ekonomi dapat saling mengisi. Diawali dengan integrasi ekonomi di satu wilayah misalnya AFTA, NAFTA, Uni Eropa, Kerjasama Selatan-Selatan dan selanjutnya harus segera direalisasikan integrasi antar wilayah misalnya kerjasama Utara-Selatan dan lain-lain. Selain tawaran kerjasama, disiplin ilmu administrasi niaga memandang bahwa untuk dapat bersaing dalam perekonomian global maka negara-negara berkembang harus memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan tidak lagi hanya keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang bisa dimulai dengan menciptakan pelaku bisnis (wira usahawan) yang memiliki kecakapan internasional. Oleh karena itu peran negara dalam membantu memfasilitasi terciptanya wirausahawan yang berwawasan internasional sangat penting dan dominan.

Penutup

Ilmu administrasi niaga adalah cabang/bagian dari ilmu administrasi yang menginduk pada ilmu-ilmu sosial. Jika dalam mata kuliah Manajemen Produksi ilmu ekonomi perusahaan membahas dari sudut analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi produksi, maka administrasi niaga mempergunakan hasil analisis tersebut untuk penyelenggaraan operasi produksi dan bagaimana memimpin penyelenggaraan produksi tersebut sebaik-baiknya. Antara administrasi niaga dengan administrasi negara terdapat perbedaan

yaitu adanya motif laba (*profit oriented*) pada administrasi niaga dan sebaliknya.

Tawaran yang diberikan oleh administrasi niaga dalam memperbaiki perekonomian nasional dan keluar dari krisis adalah dengan menciptakan dan memperkuat kelas menengah-ekonomi yang mandiri serta menciptakan wirausaha-wirausaha baru di era otonomi daerah. Untuk konteks perekonomian global administrasi niaga menawarkan solusi berupa kerjasama baik antar lembaga ataupun antar individu dalam lembaga pelaku bisnis serta adanya kepemilikan terhadap asset yang berupa *competitive advantage* melalui penciptaan wirausahawan yang berwawasan internasional

Daftar Pustaka

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Liang Gie, The. 1982. *Ilmu Administrasi*. Penerbit Super Sukses, Yogyakarta
- Mohamad, Mahatir. 2000. *Peran Baru Asia di Dunia*. PT Handal Niaga Pustaka, Jakarta
- Soeryono, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, LAN-RI
- Soetopo. 2001. *Administrasi, Manajemen dan Organisasi*. LAN-RI
- Yusuf, Nasrullah. 1998. *Kewirausahaan: Inovasi dan Bisnis Kecil*. Universitas Lampung